

# DARI METOBU HINGGA MEKAMBO: PERTUMBUHAN PERMUKIMAN KOTA KOLAKA PADA ABAD XX

Basrin Melamba

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Haluoleo

[melambabasrin@yahoo.com](mailto:melambabasrin@yahoo.com)

---

## ABSTRACT

*This paper describes the growth of Kolaka city in Bone in XX century. In early XX century, Kolaka became the capital of onderafdeeling Kolaka since 1911. In 1912 indirectly the influence of this policy was the development and repair of city facilities in the form of port medium, warehouse, office of toll and duty, and road network in Kolaka. Those settlement growths in Kolaka affected the economic activity and commerce. The settlement and physical region got much better especially after Dutch government settled the resident settlement with the settlement model following the centripetal roadway pattern with the village (kampung) pattern (o'kambo). The resident settlement pattern also followed the coastline of Mekongga and Bone Bay. Exploiting the nickel mine yielded the urban symptom in the center of area of nickel mining.*

*Key words: growth, settlement, Kolaka city*

## ABSTRAK

*Artikel ini menjelaskan tentang pertumbuhan Kota Kolaka di Bone pada abad XX. Pada awal abad XX, Kolaka menjadi ibukota daerah setingkat kabupaten (onderafdeeling) Kolaka sejak tahun 1911. Pada tahun 1912 secara tidak langsung pengaruh dari kebijakan ini adalah adanya pengembangan dan perbaikan fasilitas kota dalam bentuk sarana pelabuhan, gudang, kantor tol dan pajak, serta jaringan jalan di Kolaka. Pertumbuhan permukiman di Kolaka tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi dan perdagangan. Permukiman dan fisik wilayah menjadi jauh lebih baik terutama setelah Pemerintah Belanda menyelesaikan permukiman penduduk dengan model permukiman yang mengikuti pola jalan sentripetal dengan pola kampung (o'kambo). Pola permukiman penduduk juga mengikuti garis pantai Teluk Mekongga dan Bone. Memanfaatkan tambang nikel juga menghasilkan gejala urban di tengah area pertambangan nikel.*

*Kata kunci: pertumbuhan, permukiman, kota Kolaka*

---

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, sejarah kota tetap menarik untuk dikaji. Hal ini tidak lepas dari eksistensi dan realitas dari berbagai masalah yang menyangkut proses historis terbentuknya sebuah kota. Kota dalam berbagai wujudnya selalu memperlihatkan kecenderungan yang kadang-kadang unik. Pada dasarnya, kelahiran dan perkembangan suatu kota melalui proses historis yang panjang

berupa perubahan, baik pada kondisi fisik maupun non fisik secara dinamis.

Perubahan fisik kota dapat dilihat pada bangunan dan perkampungan masyarakat. Sementara perubahan non-fisik dapat terlihat pada perkembangan sektor perekonomian dan politik masyarakat kota. Pada perkembangan tertentu, kota selalu menunjukkan adanya proses kontinuitas. Pada masa lalu Kolaka di kenal sebagai kota perdagangan. Eksistensi itu tetap hidup

hingga sekarang, Kolaka sebagai kota dagang yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, untuk mempelajari dan memahami dinamika, karakteristik dan kecenderungan sebuah kota, maka perlu dikaji sejarahnya (Kartodirdjo, 1977: 14).

Pola permukiman penduduk sebagai salah satu bentuk dari pemanfaatan ruang perkotaan secara intensif merupakan ciri mendasar dari sebuah kota (Zuhdi, 1977: 91). Sebuah kota dianggap sebagai unit permukiman yang padat dan terorganisasi di mana orang-orang dengan aktivitas dan kekayaan memenuhi area yang sangat kecil yang terpisah jelas dengan lingkungan non kota yang mengelilinginya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wirt (dalam Daljoeni, 1999: 38) "kota sebagai permukiman penduduk yang padat dan heterogen kedudukan sosialnya". Terbentuknya sebuah kota berkaitan dengan permukiman awal yang mendahuluinya. Kota dalam hal ini mengalami proses perubahan dan perkembangan. Proses itu pada perkembangannya menjadi permukiman penduduk yang permanen dan padat. Aktivitas masyarakat kota turut memberi pengaruh bagi arah perkembangan sebuah kota, apakah perdagangan atau kota pelabuhan, kota industri, atau tipe kota lain. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perkembangan permukiman di kota Kolaka sejak sebelum datangnya kolonial hingga masa kolonial Belanda dimaksudkan agar terlihat perubahan baik sebelum dan sesudahnya.

Pada periode awal abad XIII hingga XIX kota Kolaka belum mengalami perkembangan yang signifikan. Kolaka pada saat itu berstatus sebagai ibukota kerajaan Mekongga, salah satu kerajaan *vasal (palili)* (Loewoe, XII: 731-738), atau bawahan dari kerajaan Luwu, yang

dipimpin seorang pejabat kerajaan Luwu yang disebut *Mincara Ngapa*. Pada tahun 1935 diganti dengan nama *Sulewatang Ngapa*, lihat daftar *Mincara Ngapa* dan *Sulewatang Ngapa* yang pernah bertugas di Kolaka. Pejabat ini bertugas memungut bea dan cukai di pelabuhan Kolaka, sekaligus sebagai wakil raja Luwu di daerah *palili*. Memasuki awal abad XX, secara bertahap terjadi perubahan yang cukup berarti pada wajah kota Kolaka. Apalagi setelah pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah ini pada tahun 1906.

Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kolaka (BPAD Sulsel, Reel 6), sebagai salah satu wilayah *onderafdeeling* dari *afdeeling Luwu*. Eksistensi kota Kolaka sebagai pusat politik pemerintahan kolonial Belanda dan kerajaan Mekongga diikuti oleh keberadaannya sebagai daerah perdagangan. Pada periode ini pemerintah Belanda melaksanakan eksploitasi komoditas hasil pertanian dan perkebunan, hasil-hasil hutan seperti rotan, damar, berbagai macam jenis kayu, serta hasil laut, dan peternakan. Selain itu eksploitasi tambang nikel dilaksanakan oleh *Oost Borneo Maatschappij* (O.B.M) (*Indisch Verslag*, 1930: 314). di daerah Pomalaa membuat Kota Kolaka mengalami kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi. Walaupun daerah itu belum otonom dalam arti diperintah oleh seorang *controleur*, tetapi perubahan status itu menunjukkan adanya perkembangan baru, baik dalam hal permukiman maupun sosial ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis perkembangan Kota Kolaka pada abad XX. Fokus kajian penelitian adalah Kota

Kolaka dan dinamika perkembangannya. Sumber data diperoleh dari Arsip Nasional dan Arsip Daerah. Beberapa arsip yang digunakan adalah arsip dari ANRI, BAPD, *Indisch Verslag*. Sumber primer ditambah dengan sumber sekunder dari hasil penelitian. Dari data yang terkumpul, dilakukan interpretasi terhadap pola perkembangan dan perubahan Kota Kolaka

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga saat ini, belum terdapat kajian arkeologis untuk merekonstruksi Kota Kolaka lama secara komprehensif sehingga sangat sulit untuk mengetahui bentuk morfologi Kota Kolaka sebelum periode Hindia Belanda secara utuh. Terdapat satu kajian penelitian dari Balai Arkeologi Makassar di pusat bekas kerajaan Mekongga di kompleks makam raja (*Bokeo*) Laduma gelar *Sangiang Nibandera* Pada masa pemerintahannya agama Islam masuk di Kolaka. Di kompleks makam tersebut terdapat banyak makam kuno yang merupakan kompleks pemakaman raja dan bangsawan Mekongga, di Wundulako dan situs bekas benteng Bende Wuta yang terletak di kampung Bende yang pernah menjadi pusat permukiman penduduk, dimana daerah tersebut dikelilingi oleh sebuah benteng tidak jauh dari lokasi itu (Balai Arkeologi Makassar, 2007; Baden, 1925: 3).

Lokasi benteng dan permukiman penduduk diapit oleh dua buah sungai yaitu sungai Lamekongga dan sungai Tikonu. Pada kota-kota kuno pusat kerajaan yang berlokasi di tepi atau di muara sungai dari mana kapal atau perahu-perahu memasuki wilayah kerajaan (ibukota) seperti daerah Wundulako (Kolaka) ini yang terletak di tengah

antara sungai Balandete dan Puu Ndokulo. Hal yang menarik bahwa dalam cerita-cerita tradisional ditunjukkan berbagai nama desa/kelurahan atau tempat-tempat yang masih eksis saat ini masih bisa dikenal toponiminya seperti Kelurahan Ngapa yang berarti pelabuhan, juga Watubangga artinya perahu dari batu.

Struktur permukiman penduduk Kolaka pada masa kerajaan Mekongga dimulai dari permukiman terkecil hingga permukiman yang lebih luas yaitu dimulai dari gabungan beberapa wilayah *anggalo*. *Anggalo* adalah permukiman lembah *ngarai* yang penghuninya terdiri atas empat sampai tujuh kepala keluarga yang merupakan satu rumpun keluarga dari satu keturunan. Jumlah wilayah permukiman *anggalo* mencapai ribuan). (Tarimana, 1985: 212; Tawulo, 1987: 39; Tarimana, 1990: 181- 182).

Wilayah *o'napo Onapo* adalah suatu wilayah permukiman lembah yang secara hukum adat dikuasai dan diduduki oleh gabungan kelompok yang mendiami *anggalo*. Adapun jumlah permukiman wilayah *o'napo* mencapai ratusan (Arimana, 1985: 212; Tawulo, 1987: 39; Tarimana, 1990: 182-196), Permukiman tersebut dipimpin oleh *To'onomotuo*. Kemudian gabungan beberapa permukiman *o'napo* disebut wilayah *tobu O'tobu* ialah permukiman wilayah gabungan *o'napo* yang biasanya terdiri dari empat atau tujuh permukiman *o'napo* yang saling berdekatan letaknya satu sama lain. Biasanya jumlah wilayah *o'tobu* ini mencapai puluhan.

Di Kerajaan Mekongga terdapat tujuh wilayah *tobu* yang dipimpin oleh seorang *Pu'utobu*. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, ketujuh wilayah ini dijadikan wilayah distrik (Tawulo, 1987: 40; 181 dan 182). Distrik dikepalai oleh seorang *Pu'utobu*. Ga-

bungan beberapa permukiman wilayah *tobu* disebut wilayah *wonua Wonua* adalah penamaan suatu negeri, yakni *wonua* Mekongga, yang didalamnya terdapat wilayah-wilayah *o'tobu* (distrik), *o'napo* (kampung) dan sejumlah *anggallo* (lembah). Istilah *Wonua* di beberapa daerah dikenal *Wanua*, *Banua*, dan sebagainya yang dipimpin oleh *Bokeo* (raja) Mekongga (Tarimana, 1990: 197-198).

Dalam suatu lokasi permukiman tertentu, orang Tolaki Mekongga atau biasa disebut *To* Mekongga membuat perkampungan mereka dalam bentuk seperti lingkaran pada tempat-tempat di pinggir kaki gunung atau di atas lereng bukit, disekitar kompleks perladangan, perburuan dan peternakan, yang dihubungkan dengan jalan setapak (Tarimana, 1990: 198).

Pendirian rumah-rumah penduduk maupun pejabat kerajaan dalam bentuk rumah panggung (*laika niwuatako*). Hal yang membedakan antara rumah bangsawan dengan rakyatnya adalah bentuk arsitekturnya seperti tinggi rumah, tangga, jumlah tiang, ukiran-ukiran, ukuran luas rumah, bumbungan rumah, dan sebagainya. Struktur permukiman lokal dikenal sebagai satu kelompok kerabat yang bermukim ditempat tertentu yang berada di luar pusat permukiman pertama, tempat awal terbentuknya kelompok masyarakat *anggallo* dengan cara *metobu*. Untuk menata dan menyelesaikan permasalahan antara anggota kerabat dengan pimpinan kesatuan, mereka mengangkat pemimpin dengan jabatan *To'ono motuo* (Adatrechtbundels, 1929: 186).

Pada awalnya, permukiman orang Tolaki Mekongga hanya terdiri atas tujuh *tobu* yakni *Tikonu*, *Puu'ehu*, *Sabilambo*, *Po'ondui*, *Lalombaa*, *Ulu Nggolaka*, dan *Mangolo*, yang masing-masing di kepalai oleh yang bergelar

*To'ono motuo* (Tarimana, 1989: 47). Ke tujuh wilayah permukiman *tobu* berkembang setelah Laroempalangi membentuk satu konfederasi atau gabungan dari ketujuh *to'ono motuo* tersebut menjadi satu kerajaan yaitu kerajaan Mekongga. Pemerintah wilayah pada tingkat *o'napo* terdiri atas: (1) *Toono motuo*, sebagai kepala wilayah *o'napo*, (2) *Mbuakoi* yang bertugas pada bidang upacara dan kepercayaan, (3) *Tamalaki*, yang bertugas dalam bidang pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, (4) *O'tadu* adalah ahli strategi perang, dan (5) *Tusawuta*, yang mengurus bidang pertanian mereka bermukim di masing-masing wilayah *tobu*.

Tradisi lisan menyebutkan bahwa permukiman di Kolaka di bangun oleh Laroempalangi di Kampung Ulu Balandete. Ia merupakan pendatang dari Luwu pada akhir abad XIII. Permukiman pertama orang-orang Mekongga diperkirakan berada di Kolumba, Ulu Balandete sekitar enam kilometer dari kota Kolaka sekarang. Raja pertama Larumbalangi yang berasal dari Luwu bermukim di perkampungan tersebut yang berada di tepi pantai sekitar pelabuhan tradisional Tahoa Kolaka (Pingak, 1967: 48; Aripin, 2006: 3; Hasanuddin, dkk, 2008: 16).

Sejak abad XVI masa pemerintahan Bokeo Melanga bergelar *Sangiang Lombo-Lombo* (1550-1598) permukiman semakin berkembang dengan jalan membentuk tujuh daerah permukiman *tobu*. Ke tujuh wilayah itu adalah (1) *tono'onomotuo* I Puehu (Wundulako), (2) *to'onomotuo* I Sabilambo, (3) *to'onomotuo* I Tikonu, (4) *to'onomotuo* I Lalombaa, (5) *to'onomotuo* I Lambo (6) *to'onomotuo* I Mowewe, dan (7) *to'onomotuo* I Pondui. (Pingak, 1963: 39; Gazali, dkk, 1992: 49-50; Tamburaka, 2004: 495).

Ke tujuh wilayah *tobu* ini dipimpin oleh seorang *To'onomotuo* (orang

yang dituakan). Pada perkembangan selanjutnya setelah masuknya agama Islam para *to'ono motuo* dibantu oleh beberapa aparat seperti *Sarea* (sareang) bawahan kepala *napo*. (*Adatrechtbundels*, 1917). Bentuk pola permukiman diatur menurut adat. Setiap *To'ono motuo* bermukim sesuai tempat kedudukannya, seperti *to'ono motuo* Lalombaa berkedudukan di daerah *tobu* Lalombaa begitupun selanjutnya. Mereka mengkoordinasikan tugas dan kegiatannya kepada *Bokeo* atau raja Mekongga.

Pada periode Raja Laduma dengan gelar *Sangiang Nibandera* (1699-1748), pusat pemerintahan dan permukiman penduduk pindah ke kampung Tikonu Wundulako. Wundulako merupakan suatu daerah permukiman yang sejak dahulu dikenal sebagai tempat tinggal suku Tolaki Mekongga (To Mekongga). Wundulako dikenal juga sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mekongga (Bernadeta AKW, et al, 2004: 8). Hal ini kemudian memacu berkembangnya permukiman penduduk di sekitar kompleks benteng tanah yang dibangun oleh Latoranga, (Hasanuddin, dkk, 2008).

Fragmen keramik yang ditemukan di situs ini sebagian besar berasal dari bentuk wadah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mangkuk, piring, guci, dan pot, di samping itu di kompleks ini banyak ditemukan kepingan mata uang China dan Arab. Hal itu menunjukkan bahwa situs Kampung Bende atau lokasi benteng merupakan situs permukiman. Pembukaan permukiman lokasi benteng ini melalui pertimbangan baik sudut ekonomi maupun dari sudut politik, karena di sebelah utara mengalir sungai Lamekongga yang merupakan akses penting perdagangan hasil bumi dari masyarakat yang bermukim di daerah hulu ke daerah pesisir (Hasanuddin dkk, 2008:

38).

Pada abad XIX hingga awal abad XX pola permukiman di Kolaka masih mengikuti pola lama yaitu *metobu*, atau belum banyak mengalami perubahan. Permukiman penduduk masih terpisah belum menyatu atau memusat, meskipun terdapat beberapa bentuk permukiman yang sudah menyatu dan padat utama di daerah pelabuhan seperti Posilui, Kolaka, dan Tahoa. Lokasi permukiman raja Mekongga masih berpusat di Wundulako di tempat ini terdapat permukiman para pejabat kerajaan seperti Tamalaki dan Tolea. Permukiman diatur menurut adat setiap pejabat kerajaan bermukim sesuai dengan tugas, dan perannya.

Seorang *Bokeo* berkedudukan di Wundulako sebagai raja yang memperoleh penghasilan harian berupa 1 ikat padi dari penduduk yang tinggal dekat dengannya, 1 *kati* beras dari penduduk yang tinggal jauh dari tempat tinggalnya, 1/100 dari hasil hutan yang dikumpulkan, pajak ladang sebesar f. 2,50,- setiap hektar dan meminta tenaga kerja laki-laki apabila ia memerlukan untuk mengerjakan ladang padi. (Baden, 1925: . 13). Seorang *Kapita* bertugas untuk melaksanakan perintah raja dan menjadi perantara Datu Luwu dengan *Bokeo* raja Mekongga. Untuk pekerjaannya tersebut ia akan memperoleh 1/3 bagian penghasilan *Bokeo* yang diperoleh dari daerah Lambo dan Lalembo. Ia juga berhak meminta tenaga kerja pada saat ia membutuhkannya, ia berkedudukan di kampung Balandete.

Seorang *Pabitara* atau *pabicara* mempunyai tugas untuk mengolah ladang dan kebun *Bokeo* mulai dari proses penanaman, perawatan dan pemanenan. Untuk pekerjaan itu ia memperoleh imbalan bagian hasil panen dari *Bokeo* yang besarnya tergantung kebijakan *Bokeo* atau raja.

Selain ia juga menerima langsung bagian hasil panen dari penduduk di daerah tempat tinggalnya yang disebut Kampung Epe oleh karena fungsinya di dalam melakukan pengawasan (Baden, 1925: 13-14). Seorang *Sapati* memperoleh penghasilan dari pajak bea masuk berbagai macam barang dari luar daerah dan juga dari penyelidikan suatu tindakan pidana atau kriminal, misalnya membunuh, merampok, dan berbuat jahat. Untuk pengerahan tenaga kerja ia hanya berhak meminta kepada penduduk Kolakaasi, Ulu Kolaka dan Sakuli, ia berkedudukan di daerah Sakuli (Baden, 1925: 13-14).

Seorang *Anakia Mbuutobu* adalah juga merupakan kepala kampung yang tidak memiliki hak memungut pajak. Ia diperbolehkan untuk meminta bantuan tenaga kerja dari penduduk di kampungnya untuk bekerja di ladangnya, ia bertempat tinggal di kampung *Woimeeto* (kali merah) (Tarimana, 1985). Rumah Sulewatang tetap berada di daerah dekat pelabuhan. Ia bertugas menarik pajak berupa bea dan cukai di pelabuhan Kolaka. Jadi tempat bermukimnya pejabat kerajaan sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada periode selanjutnya, di Kolaka terdapat permukiman orang-orang Bajo berada di Kampung Posilui. Mereka datang selama terjadinya perang Bone pada tahun 1824-1825 orang-orang Bajo ini berasal dari daerah Bajoe di Sulawesi Selatan (Velthoen, 2006: 5; J.N. Vosmaer, 1839: 73). Permukiman orang-orang Bajo berada dipinggiran laut seperti Leppe selain itu permukiman mereka terdapat di Pomalaa Labuan Bajo, Wolo, pulau Lambasina Besar, Lambasina Kecil, Padamarang, dan Maniang.

Umumnya rumah mereka berbentuk rumah panggung atau mengampung, untuk menghubungkan antara permukiman yang satu dengan lainnya maka mereka membuat titian sebagai

jalan yang menghubungkan antara rumah kerabat yang satu dengan yang lainnya (Fatmawati, 2006: 15). Pada abad XIX, menurut Morris bahwa jumlah kampung penting di kota Kolaka hanya 3 buah yaitu; Kolaka, Tohowa/Tahoa, dan Passulu atau Posilui. (Morris, 1887: 551; Loewoe, tahun. XII, : 738).

Informasi itu tidak sepenuhnya benar karena di beberapa kampung di kota Kolaka masih terdapat kampung-kampung yang luput dari perhatiannya seperti Wundulako tempat kedudukan Bokeo, Epe sebagai tempat kedudukan Pabitara, Balandete sebagai tempat kedudukan Kapita, Sakuli sebagai tempat kedudukan Sapati dan sebagainya. Pada periode ini permukiman di Kolaka bertambah ramai akibat terjadinya migrasi masuk para pedagang dari Luwu dan Bone. Mereka ini bermukim dipinggir laut seperti di kampung Mangolo, Wolo, Posilui, Tahoa, Kolaka dan beberapa pulau di kota Kolaka. Penduduk pribumi membangun permukiman terpisah dari permukiman orang-orang Luwu dan Bugis, termasuk lokasi areal perkuburan mereka terpisah. Penduduk pribumi, baik penduduk asli Mekongga maupun Moronene umumnya membentuk permukiman selain dekat perkebunan juga disepanjang tepi sungai atau pantai.

Perubahan-perubahan mendadak terjadi setelah pemerintah Hindia Belanda menguasai kekuatan politik dan ekonomi di Kolaka pada awal abad XX. Hal ini membawa dampak termasuk kebijakan pengaturan struktur wilayah permukiman. Permukiman diubah dengan memperkenalkan sistem baru yaitu *mekambo* atau bermukim di kampung yang dipimpin oleh para *Kapala Kambo* atau kepala kampung dibantu oleh juru tulis dan *Sareang*. Permukiman wilayah *tobu* diganti dengan sistem distrik yang merupakan kumpulan dari

beberapa permukiman kampung atau *o'kambo*. Tingkat distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik dengan gelar *Mokole* dan tingkat negeri yang dijabat seorang raja atau *Bokeo*.

Permukiman berbentuk *mekambo* atau kampung (*o'kambo*) merupakan satu wilayah pemerintahan yang terkecil dari jenjang penataan wilayah administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Belanda. Penduduk dipaksa meninggalkan permukimannya (Tarimana, 1985: 121). Terdapat beberapa kebijakan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka mengatur permukiman serta tempat tinggal penduduk di daerah ini dan pemberian nama-nama kampung.

Permukiman penduduk mulai diatur dengan cara yaitu: (1) meregistrasi penduduk laki-laki yang sudah dewasa; (2) Memberikan surat keterangan bahwa seseorang sudah didaftarkan; (3) Mengatur perumahan pada poros-poros jalanan agar penduduk mudah diatur dan dikontrol; dan (4) Mengangkat kepala kampung (*kapala kambo*) disetiap permukiman (kampung) (Surat Keputusan *zelfbestuur* Luwu nomor 36 tahun 1938 tentang surat kampung yang syah; *Adatrechtbundels*, 1920: 185; Konggosa, 1982: 63; Tarimana, 1989).

Kebijakan ini dilaksanakan agar pemerintah Hindia Belanda mudah melakukan pengawasan terhadap penduduk, pendataan penduduk guna kepentingan kerja wajib (*heeredienst*), pemungutan pajak, serta demi terciptanya keamanan bagi penduduk. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya nomor 10 perihal pemindahan dan pemusatan kampung tanggal 8 Desember 1918, ditujukan kepada semua daerah mulai dari tingkatan *Afdeeling*, *Onderafdeeling* hingga tingkat kampung (Badan Arsip dan Per-

pustakaan Daerah, 2003).

Pola permukiman penduduk sebagai salah satu bentuk dari pemanfaatan ruang perkotaan secara intensif merupakan ciri yang mendasar dari sebuah kota. Seiring dengan berkembangnya penduduk dan permukiman serta adanya kebijakan pemerintah Belanda mengharuskan penduduk membuat rumah berhadapan dengan jalan raya. Maka sejak itu di kota Kolaka muncul permukiman baru yang lebih teratur dengan pola mengikuti jalan raya. Kebijakan ini berpengaruh terhadap pola permukiman penduduk yang sudah tidak lagi terpecah tetapi sudah memusat, diantara kampung tersebut adalah Laronaha, Liku, kambo dawa atau kampung Jawa, Kolakaasih, Watumbasi, Likoe, kampung Lalombaa, Sabilambo, Wundulako, Tikonu, Kowioha, Pomalaa, Tangetada, Mangolo, kambo baru, Liku, dan Ulu Balandete.

Setiap kampung diangkat seorang kepala dengan gelar *kapala kambo*, yang dibantu oleh juru tulis dan Sareang. Kepala kampung ini diangkat oleh Datu Luwu dan hanya cukup meminta persetujuan dari Asisten Residen yang berkedudukan di kota Palopo. Sebagai contoh di Kampung Likoe (Liku) diangkat Abraham dengan gelar kepala (*kapala*) pengangkatannya berdasarkan *besluit zelfbestuur* Luwu nomor. 134 tanggal 9 September 1936, (*besluit zelfbestuur Loewoe* nomor 134 tanggal 9 September 1936). Mereka mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Luwu.

Hal yang masih dipertahankan mengenai tradisi permukiman yaitu permukiman para pejabat Kerajaan Mekongga seperti *Sapati*, *Kapita*, *Pabitara*, dan *Sulewatang* tetap dipertahankan. *Sulewatang* masih tetap bertempat di dekat pelabuhan sesuai dengan perannya, *Sapati* bermukim di Kampung Sakuli, *Pabitara* di Kampung Epe,

dan *Kapita* bermukim di Kampung Balandete. Permukiman istana Raja Mekongga dipindahkan. Istana *raha bokeo* atau rumah raja semakin tidak memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang otonom sehingga lingkungan *raha bokeo* tidak lagi menjadi pusat orientasi permukiman penduduk. Kedudukannya digantikan oleh pelabuhan yang merupakan pusat aktivitas pemerintah Belanda.

Pusat orientasi permukiman tidak lagi di kawasan ibukota kerajaan di Kowioha, tetapi sudah berada di kawasan pelabuhan disepanjang teluk Mekongga. Untuk memudahkan pengawasan terhadap pemerintahan pribumi, pemerintah Belanda memindahkan istana atau *raha bokeo* Mekongga ke Kampung Sabilambo. Pendirian istana tersebut tidak jauh dari kompleks kantor kontrolir Kolaka. Selain istana atau *raha bokeo* yang dibangun di kompleks ini, raja Latambaga juga membangun rumah ditempat tersebut untuk istri pertamanya dengan gaya arsitektur bugis, sedangkan istri keduanya dengan gaya arsitektur Eropa (Zlabbekoorn, 1927: 34).

Perkembangan permukiman juga terlihat dari pembukaan beberapa permukiman baru sebagai konsekuensi akan kebutuhan lahan bagi permukiman penduduk. Pemerintah Belanda bekerja sama dengan raja Latambaga membuka permukiman baru yang diberi nama *kambo baru* (kampung baru). Di tempat ini juga dibangun gedung sekolah desa *Volkschool*, dan di lokasi ini dijadikan sebagai pemakaman keluarga raja dan bangsawan Mekongga.

Berbagai fasilitas dibangun membutuhkan lahan baru sehingga di kota Kolaka pada saat itu nampak permukiman semakin ramai akibat didirikannya fasilitas seperti kantor pemerintah, gudang, kantor Duane, rumah Sulewatang, penjara, pemanfaatan

ruang juga digunakan untuk sarana olahraga berupa lapangan tenis dan bola, pasar dan kompleks pertokoan orang-orang Cina, sekolah rakyat, fasilitas ibadah (gereja dan masjid), rumah sakit atau poliklinik, warung makan, dan permukiman penduduk. Rumah *Bokeo* di kampung Sabilambo dekat sungai *Menggoheo* lokasi tersebut tidak jauh dari pelabuhan Kolaka.

Di setiap kampung dibangun satu rumah tempat jaga (*raha walanda*) dan tempat istirahat (pesangrahan). Setiap penduduk laki-laki dewasa secara bergiliran bertugas untuk menjaga jika ada surat yang perlu disampaikan dari pemerintah di kota kepada petugas atau pejabat di daerah pedalaman atau sebaliknya. Mereka inilah secara estafet harus membawa surat dimaksud dari satu kampung ke kampung berikutnya, hingga akhirnya surat itu sampai pada tujuannya.

Surat-surat yang sifatnya kilat (ekspres) diberi tanda dengan melekatkan pada sampul surat berupa "bulu ayam" artinya harus cepat dikirim atau terbang seperti burung (Zlabbekoorn, 1927: 64). Selain surat yang ditulis menggunakan kertas juga dijumpai surat yang ditulis dengan menggunakan bahan kulit rusa sehingga penduduk mengenalnya dengan sebutan "*sura nggulidonga*" surat dari kulit rusa. (Wawancara dengan Sanurung, Parinama Mbio, dan Abd. Rahim di Kolaka tanggal, 18 Agustus 2008).

Setiap permukiman kampung terdapat rumah kepala kampung biasanya berada di tengah kampung dan di tempat ini pula dibangun rumah pertemuan penduduk yang disebut *laika mbuu* atau rumah pokok/rumah pertemuan. Kepala kampung merupakan kepala-kepala pribumi yang kemudian statusnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan Asisten Residen Luwu.

Pembangunan jalan di Kota Ko-

laka mempengaruhi pola permukiman, dan pendirian rumah-rumah penduduk yang mengikuti pola jaringan jalan. Permukiman penduduk mengikuti jalan dari kota Kolaka ke Mangolo, selanjutnya dari pusat kota Kolaka ke kampung Wundulako. Jalan dari Kolaka menuju arah selatan Wundulako, sepanjang jalan tersebut berjejer rumah-rumah baru. Selain itu terdapat permukiman penduduk di jalan yang menghubungkan Wundulako ke arah kampung Sakuli dan kampung Tahoa (Arsip *Celebes* [1908-1945] BAPD Sulsel reel. 6, 11).

Pada dasarnya arah hadap rumah lebih disebabkan oleh faktor kesesuaian kondisi jalan kampung yang sebagian besar saling berhadapan yang dibatasi oleh jalan sebagai akses berhubungan dengan kampung-kampung di sekitarnya. Permukiman penduduk juga mengikuti jaringan jalan dari Kolaka ke selatan sampai Tangketada yang jarak 27 km. Kemudian permukiman dari kampung Tangetada sampai Tondowolio berjarak 9 km. Selain itu terdapat permukiman penduduk yang menghubungkan Kota Kolaka dengan Kampung Lalolipu. Permukiman penduduk juga terdapat di kampung Mangolo sampai Pakue yang melewati perkebunan kelapa di Lapao-Pao.

Seiring dengan aktivitas sosial ekonomi maka pada tahun 1930-an diadakan perluasan dan pemekaran batas-batas wilayah kota merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dihindari. Pemekaran wilayah kota merupakan ciri yang koheren sebuah kota yang sedang berkembang yang selalu membutuhkan ruang baru untuk aktivitasnya. Sudah barang tentu ada berbagai faktor yang mendorong terjadinya pemekaran sebuah kota. Dimana wilayah distrik Kolaka dibagi menjadi dua bagian yaitu distrik Kolaka A bagian selatan dan distrik Kolaka B mengarah bagian utara (Zlabbekoorn,

1927: 14). Berkaitan pemekaran ini pemerintah Hindia Belanda mengarahkan permukiman penduduk di sepanjang jaringan jalan ini yang menghubungkan beberapa kampung di kedua distrik tersebut dengan Ulu Kolaka. Di kota ini terdapat permukiman penduduk di sepanjang pesisir teluk Mekongga umumnya mereka adalah pedagang dan nelayan.

Permukiman orang-orang Bajo pada zaman Belanda tidak mengalami perubahan, mereka mendirikan rumah-rumah panggung di pesisir pantai seperti kampung Labuan Bajo, Leppe, dan Wolo. Tata letak rumah mereka tidak memiliki keteraturan sebab rumah-rumah menghadap kelaut, namun juga terdapat rumah yang menghadap ke jalan.

Kemajuan niaga ternyata bukan hanya menarik kaum pedagang, tetapi juga memicu terbentuknya permukiman-permukiman baru. Begitu pula orang Bugis, Cina dan Arab yang membangun permukiman di sekitar pantai dan pelabuhan Kolaka sebagai daerah perdagangan. Untuk itulah maka kompleks permukiman etnik Bugis, dan Cina sangat strategis karena selalu sesuai dengan pola utama kehidupan mereka sebagai pedagang yakni berdekatan dengan pelabuhan dan pasar. Pada awalnya perkembangan kota Kolaka cenderung ke arah Utara, namun setelah dibukanya tambang nikel perkembangannya dan permukiman penduduk mengarah ke arah Selatan kota Kolaka. Perubahan ekologis mendadak terjadi setelah dibukanya eksplorasi penambangan nikel di kampung Pomalaa. Dimana gunung-gunung yang mengandung nikel digusur. Munculnya permukiman baru bagi para pekerja tambang, bangunan kantor pabrik N.V. OBM, serta terbentuknya permukiman penduduk disepanjang jalan mulai dari kampung Pomalaa menuju ke ibukota

Kolaka yang berjarak sekitar 27 km.

Di Kampung Pomalaa permukiman berkembang dengan begitu cepat sejak dilaksanakannya eksploitasi tahun 1934, lokasi permukiman di tempat ini bertambah ramai. Guna mendukung kegiatan penambangan pihak OBM juga membangun kantor pabrik pengolahan biji nikel seluas 600 x 600 meter bujur sangkar. Kemudian tahun 1936 pihak perusahaan membangun lokasi permukiman para pekerja, poliklinik dan beberapa permukiman berupa perumahan bagi para pegawai. Penyediaan lokasi bagi para pekerja ini telah mendorong terbentuknya permukiman baru seperti permukiman orang Jawa. Pembentukan permukiman orang Jawa diawali dengan kebijakan kolonisasi Belanda mendatangkannya di daerah ini untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang nikel di Pomalaa (La Ode Malim, 1978/1979: 33). Untuk itu, pemerintah menempatkan satu kompleks khusus bagi permukiman orang-orang Jawa yang disebut dengan *kambo Dawa* yang berarti kampung Jawa.

## SIMPULAN

Perkembangan permukiman di Kolaka bersifat menghilangkan identitas budaya lokal hal ini terkait kebijakan kolonial Belanda dalam membuka jaringan jalan dalam rangka kepentingan eksploitasi komoditas ekspor, dengan memperkenalkan sistem *mekambo*. Kebijakan ini juga yang diiringi dengan pembukaan dan pengaturan permukiman penduduk. Perubahan yang menonjol terjadi ketika Kolaka menjadi ibukota *onderafdeeling* Kolaka pada tahun 1911. Pada tahun 1912 pengaruh langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan, gudang, kantor bea dan cukai dan jaringan jalan di

kota Kolaka maupun yang menghubungkan kota dengan pedalaman dan kota-kota di kawasan teluk Bone dan Sulawesi Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

ANRI, Bouman, G. W, *MvO Afdeeling Boeton en Laiwoei*, Koleksi Microflim ANRI, Jakarta, Reel 31, Seri Ie 6, Celebes en Onderhorigheden, 1933.

-----, Man, A. De, *MvO Kontrolir Malili*, 19 Agustus 1937, Jakarta.

BAPD Sulsel, Arsip Celebes (1908-1945) Nomor reel: 6, 14, 102, 104, 105, 108, 121., Koleksi BAPD Sulsel Makassar.

BPAD, surat Th. Baltrusch de *directeur der landschapswerken* Makassar, nomor; 276/4 tgl, 20 Januari 1937 perihal Salinan surat penawaran kepada Kontrolleur Kolaka.

Baden, P.J. M, *Rapport betreffende het vormen hadatgemenschappen in Onderafdeeling Kolaka*, Kolaka, 17 Juli 1925. Arsip Celebes nomor reel 14.

-----, surat controleur Kolaka nomor: 501/C1, tanggal, 10 Maret 1925 perihal kedudukan distrik dan persekutuan adat di Kolaka.

Indisch Verslag, 1930, 1931, dan 1935.

*Jaar Verslaag* tahun 1907, 1915, 1920, 1926, 1928, 1929 dan 1930.

### Buku

Adatrechtbundels. 1929. *Gegevens nopenz Zuidoost-Selebes (1917-1919)*. Dell XXXI: Selebes, s-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Arifin, Munaser. 1993. *Mengungkap Riwayat Sangia Nibandera*. Kolaka: Depdikbud.

Bernadeta AKW, dkk. 2003. *Ekskavasi Situs Kompleks Makam raja Sangia Nibandera, Wundulako Kolaka, Sulawesi Tenggara Tahap I*. Makassar: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Arkeologi Makassar

C.H. Pingak. 1963. *Dokumenta Kolaka*. Kolaka: Pemerintah Kabupaten Kolaka.

- Daldjoeni, N. 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.
- Fatmawati, Munir. 2006. *Aktivitas dan Integritas Budaya Suku Bajo di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara*. Makassar: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Arkeologi Makassar.
- Gazali, Muhammad dkk., *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kerjasama FKIP Unhalu Dengan Pemerintah Daerah TK.I Sulawesi Tenggara.
- Hasanuddin, dkk. 2008. *Ekskavasi Benteng Mekongga di Desa Bende, Kec. Wundulako Kabupaten Kolaka*. Makassar: Balai Arkeologi Makassar dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kolaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 1977. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*. Jakarta: Bhrata Karya Aksara.
- Konggoasa. t.t *Sulawesi Tenggara dari Zaman ke Zaman*. Naskah tidak diterbitkan.
- La Ode Malim, et al. 1978/1979. *Pengaruh Migrasi Terhadap terhadap Kebudayaan Daerah*. Kendari: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sultra.
- Morris, D.F. van Braam, 1889. "Het landschap Loewoe", *TBG XXXII*, 1889. pp. 498-555.
- Sarasin, Paul und Fritz, *Reisen in Celebes, reise von der Mingkoka Bai nach Kendari Sudost-Celebes*. Wiesbaden. C.W. Breidel's Verlag. 1905.
- Tarimana, Abdurrauf. 1985. "Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki; Suatu Lukisan Tentang Asas Klasifikasi Simbolik dan Struktural dalam Kebudayaan Orang Tolaki di Kendari dan di Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara". Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1989. *Konsep "Mohopulei Wonua (Budaya Kepemimpinan) Pada Masyarakat Tolaki di Propinsi Sulawesi Tenggara (Suatu Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Politik)*, Kendari: Balai Penelitian Univ. Haluoleo.
- . 1993. *Seri Etnografi Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Velthoen, Esther and Gregory L, Acciaioli. 1993. "Fluactuating States, Mobile Populations: Shifting Relations of Bajo to Local Rulers and Bugis Traders in Colonial Eastern Sulawesi". *Makalah*. Disajikan pada International Seminar On Bajau Communities. Jakarta, 22 – 25 November 1993. Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
- Vosmaer, J.N. 1839. "Korte beschrijving van Z.O schriereiland van Celebes in het bijzonder van vosmaerbaai of van Kendari; met berigten omtrentden stam der Badjos". dalam *VBGKW XVII*. 1839. hlm. 63-184.